



PANDUAN KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN **KORTEKRENBANG 2020**



DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Jl. Taman Makam Pahlawan No.20, Kalibata - Jakarta Selatan

KATA PENGANTAR

DIRJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa pembangunan daerah adalah perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Berkaitan dengan hal tersebut, kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Daerah untuk memastikan dukungan masing-masing dalam pencapaian target pembangunan nasional, melalui koordinasi teknis pembangunan antara kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah, sebagaimana amanat Pasal 258 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Koordinasi teknis merupakan salah satu wadah bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk secara bersama-sama melakukan sinkronisasi dan harmonisasi untuk mencapai target pembangunan nasional yang hanya bisa dicapai jika dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Koordinasi teknis pembangunan antara kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah ini dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

Dalam rangka mendukung suksesnya pelaksanaan Kortekrenbang ini, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menyiapkan panduan tentang mekanisme pelaksanaan dan informasi umum yang berkaitan dengan rangkaian pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Kortekrenbang) Tahun 2020.

Selamat mengikuti rangkaian pelaksanaan Kortekrenbang Tahun 2020.

Jakarta, 2 Maret 2020
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah,
Kementerian Dalam Negeri

Dr. Ir. Muhammad Hudori, M. Si

LATAR BELAKANG

1

Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Oleh karena itu, seyogyanya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan sinkronisasi perencanaan pembangunan dalam rangka terwujudnya efisiensi dan efektivitas pencapaian target pembangunan nasional. Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu:

- a. Pencapaian target pembangunan nasional, bisa hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat, seperti pertahanan, keamanan, politik luar negeri, dan lainnya. Namun, juga bisa dilakukan oleh semua tingkat pemerintahan sesuai dengan kewenangan. Dalam kerangka pencapaian tersebut, maka target pembangunan nasional harus dijabarkan ke semua tingkat pemerintahan sesuai dengan kewenangan.
- b. Pasal 258 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan, melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Daerah untuk mencapai target pembangunan nasional.
- c. Dan sesuai Pasal 259 ayat (1) dan ayat (2), bahwa untuk mencapai target pembangunan nasional dilakukan koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah. Koordinasi teknis

pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah tersebut dikoordinasikan oleh Menteri dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.

TUJUAN DAN KELUARAN

2

A. TUJUAN

Terbangunnya sinkronisasi rencana program dan kegiatan antara pemerintah dengan pemerintah daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan nasional.

B. KELUARAN

- a. Kesepakatan antara pusat dan daerah terhadap program/kegiatan serta usulan/rekomendasi untuk memenuhi pencapaian target pembangunan nasional sebagai masukan dalam Kortek Provinsi dan Musrenbang Nasional.
- b. Masukan bagi Pemerintah Pusat dalam penyempurnaan rancangan awal RKP Tahun 2021 dan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah dalam penyempurnaan rancangan awal RKPD Tahun 2021.
- c. Usulan pemerintah daerah terhadap kegiatan pemerintah pusat di daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

C. SUBSTANSI PEMBAHASAN

Pembahasan dalam Koordinasi Teknis Perencanaan meliputi substansi sebagai berikut:

1. Pembahasan komitmen daerah dalam mendukung pencapaian target pembangunan nasional berdasarkan urusan pemerintahan.
2. Pembahasan komitmen daerah dalam pelaksanaan Prioritas Nasional dan pencapaian target pembangunan nasional yang tercantum pada RPJMN Tahun 2020-2024.
3. Pembahasan dukungan daerah terhadap pelaksanaan Proyek Prioritas Nasional dan/atau *Major Project*.
4. Pembahasan usulan oleh pemerintah daerah terhadap kegiatan yang menjadi kewenangan kementerian/lembaga di daerah.

JADWAL DAN PESERTA

3

REGIONAL I

Hari	:	Senin s.d. Jumat
Tanggal	:	2 s.d. 6 Maret 2020
Tempat	:	Shangri-la Hotel Jalan Mayjen Sungkono No. 120 - Surabaya
Peserta Pusat	:	1. Kementerian Dalam Negeri 2. Bappenas 3. Kementerian Keuangan 4. Kementerian/Lembaga
Peserta Daerah	:	1. Jawa Timur 2. Nusa Tenggara Barat 3. Nusa Tenggara Timur 4. Kalimantan Barat 5. Kalimantan Tengah 6. Kalimantan Selatan 7. Kalimantan Timur 8. Kalimantan Utara 9. Sulawesi Tengah 10. Sulawesi Barat 11. Sulawesi Selatan 12. Gorontalo 13. Sulawesi Utara 14. Sulawesi Tenggara 15. Maluku 16. Maluku Utara 17. Papua 18. Papua Barat

Unsur Daerah yang : diundang	1. Sekretariat Daerah 2. Bappeda 3. Dinas/PD
---------------------------------	--

REGIONAL II

Hari	: Senin s.d. Jumat
Tanggal	: 9 s.d. 13 Maret 2020
Tempat	: Hotel Grand Aquilla Jl. Dr. Djunjunan No. 116 - Bandung
Peserta Pusat	: 1. Kementerian Dalam Negeri 2. Bappenas 3. Kementerian Keuangan 4. Kementerian/Lembaga
Peserta Daerah	: 1. Aceh 2. Sumatera Utara 3. Sumatera Barat 4. Riau 5. Kepulauan Riau 6. Jambi 7. Bengkulu 8. Sumatera Selatan 9. Bangka Belitung 10. Lampung 11. DKI Jakarta 12. Jawa Barat 13. Banten 14. Jawa Tengah 15. DI Yogyakarta 16. Bali
Unsur Daerah yang : diundang	1. Sekretariat Daerah 2. Bappeda 3. Dinas/PD

MEKANISME KORTEKRENBANG

4

A. TAHAPAN PELAKSANAAN KORTEK

- 1) Paparan para Nara Sumber.
- 2) *Keynote Speech* oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.
- 3) Arahan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- 4) Pembukaan oleh Menteri Dalam Negeri.
- 5) Pembahasan dalam *desk* tentang:
 - a. komitmen dan dukungan daerah dalam pencapaian target pembangunan nasional di masing-masing urusan, pelaksanaan Prioritas Nasional dan pencapaian target pembangunan nasional yang tercantum pada RPJMN Tahun 2020-2024, serta pelaksanaan Proyek Prioritas Nasional dan/atau *Major Project*,
 - b. percepatan pembangunan daerah dengan pendekatan kewilayahan; dan
 - c. usulan pemerintah daerah atas kegiatan kewenangan Kementerian/Lembaga di daerah.
- 6) Penutupan.

B. PANDUAN PEMBAHASAN DALAM DESK

1. Menggunakan sistem e-Rakortek yang terdapat pada SIPD.
2. Pembahasan diikuti oleh perwakilan pejabat dari Kementerian Dalam Negeri, Bappenas,

- Kementerian/Lembaga terkait urusan pemerintahan, dan Bappeda atau perangkat daerah provinsi terkait.
3. Pembahasan desk berdasarkan urusan pemerintahan dipimpin oleh perwakilan pejabat dari Kementerian Dalam Negeri dan menggunakan aplikasi e-Rakortek. Login dilakukan oleh Penanggung Jawab Urusan (Kemendagri).
 4. Pembahasan desk kewilayahan dipimpin oleh perwakilan pejabat dari Kementerian PPN/Bappenas dan menggunakan aplikasi e-Rakortek. Login dilakukan oleh penanggung jawab *desk*.
 5. Memeriksa kelengkapan data dukung sesuai menu yang ada dalam sistem e-Rakortek.
 6. Membahas dan mengklarifikasi substansi sebagai berikut:
 - a) Desk Urusan
 - 1) komitmen daerah dalam mendukung pencapaian target pembangunan nasional.
 - 2) komitmen daerah dalam pelaksanaan Prioritas Nasional dan pencapaian target pembangunan nasional yang tercantum pada RPJMN Tahun 2020-2024.
 - 3) komitmen para *stakeholders* dalam mendukung kepentingan nasional.
 - b) Desk Kewilayahan
 - 1) komitmen daerah dalam pencapaian target indikator makro
 - 2) dukungan daerah terhadap pelaksanaan Proyek Prioritas Nasional dan/atau *Major Project*.
 - 3) usulan oleh pemerintah daerah terhadap kegiatan yang menjadi kewenangan kementerian/lembaga di daerah.

7. Menyepakati dan menuangkan hasil pembahasan dan klarifikasi dalam berita acara kesepakatan.
8. Penandatanganan berita acara hasil pembahasan dan klarifikasi antara kementerian/lembaga dengan daerah di masing-masing desk oleh:
 - a) Perwakilan Kemendagri.
 - b) Perwakilan Bappenas.
 - c) Perwakilan kementerian/lembaga.
 - d) Perwakilan Pemda Provinsi (Bappeda/Perangkat Daerah).
9. Pembahasan desk urusan dibatasi selama 90 menit.
10. Pembahasan desk kewilayahan dilakukan selama 3 s.d. 6 jam.
11. Kriteria Pembahasan dan Klarifikasi dalam Desk Urusan
 - a) Pencapaian target pembangunan nasional/kinerja urusan oleh Daerah
 - 1) Program, kegiatan, proyek, lokasi, dan pagu yang mendukung pencapaian target pembangunan nasional yang menjadi kewenangan Pemerintah daerah.
 - 2) Dibiayai oleh APBD.
 - 3) Program dan kegiatan serta lokasi sesuai dengan lokasi prioritas nasional.
 - b) Pencapaian target pembangunan nasional/kinerja urusan oleh kementerian/lembaga
 - 1) Program, kegiatan dan proyek prioritas harus sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
 - 2) Dibiayai oleh APBN.
 - 3) Penetapan lokasi sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan kesiapan daerah.

- 4) Target sesuai RPJMN/Draft RKP dan menyesuaikan dengan potensi daerah.
- c) Dukungan Pelaksanaan Prioritas Nasional dan Pencapaian Target RPJMN Tahun 2020-2024
 - 1) Program, kegiatan, lokasi dan pagu yang menjadi kewenangan daerah.
 - 2) Dibiayai APBD
12. Kriteria pembahasan Desk Kewilayahannya
 - a) Target Indikator Makro Daerah (Target RPJMD/RKPD);
 - b) Usulan Provinsi 3 (tiga) Usulan terkait Major Project dan 3 (tiga) Usulan Prioritas Nasional (kesiapan lahan, izin, dan pola pembiayaan) Usulan Major Project harus sesuai dengan usulan Gubernur dalam Rakor Gubernur;
 - c) Usulan Kab/Kota 3 (tiga) Usulan Prioritas Nasional (kesiapan lahan, izin, dan pola pembiayaan);
 - d) Dukungan Pemerintah Daerah (APBD) terhadap pencapaian Target Pembangunan Nasional.
 - e) Usulan pemerintah daerah terhadap pencapaian Prioritas Nasional (PN) yang terkait dengan pembangunan kawasan perbatasan negara

C. PEMBAGIAN TUGAS DALAM DESK URUSAN

1. Kemendagri
 - a. Menyampaikan evaluasi capaian pembangunan daerah per urusan serta memberikan dorongan kepada daerah untuk melakukan penyelarasan pembangunan dalam upaya pencapaian target pembangunan nasional; dan
 - b. Mengoordinasikan dukungan daerah terhadap target pembangunan nasional dan pelaksanaan Proyek Prioritas Nasional dan/atau *Major Projects* sesuai dengan pembagian urusan.

2. Kementerian/Lembaga
 - a. Memastikan dukungan daerah dalam pencapaian target pembangunan nasional sesuai kinerja urusan dan pelaksanaan Proyek Prioritas Nasional dan/atau *Major Project*.
 - b. Mempertimbangkan usulan oleh pemerintah daerah dalam penyempurnaan rancangan RKP Tahun 2021.
3. Bappenas
 - a. Menyampaikan tema, sasaran, arah kebijakan, Prioritas Pembangunan dalam RPJMN, RKP dan indikasi sebaran lokasi pelaksanaan *Major Project*,
 - b. Mengoordinasikan keterpaduan program dan kegiatan seluruh kementerian/Lembaga dalam mengatasi permasalahan dan mengembangkan potensi daerah.
 - c. Mengoordinasikan kementerian/Lembaga dalam menindaklanjuti usulan pemerintah daerah terhadap kegiatan yang menjadi kewenangannya.
4. Pemerintah Daerah
 - a. Memberikan gambaran dukungan daerah terhadap pencapaian target pembangunan nasional sesuai kinerja urusan, pelaksanaan Prioritas Nasional dan pencapaian target pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024, serta pelaksanaan Proyek Prioritas Nasional dan/atau *Major Project*.
 - b. Menyampaikan usulan terhadap kegiatan yang menjadi kewenangan kementerian/Lembaga di daerah dalam rangka pencapaian target nasional dan peningkatan pelayanan di daerah.

5. Notulen (Kemendagri dan Bappenas)
Mencatat hasil kesepakatan Kortek.

D. TINDAK LANJUT

Hasil dari Kortek Perencanaan ini menjadi bahan dalam penyelenggaraan Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Bagi Pemerintah Pusat
 1. Penyempurnaan Program, Kegiatan, Proyek K/L, Lokasi dan Target dalam RKP
 2. Penyusunan Rancangan Awal Renja K/L
 3. Menjadi dasar pembahasan dalam Musrenbang Nasional.
- b. Bagi Pemerintah Daerah
 1. Penyempurnaan Program, kegiatan, proyek daerah, lokasi dan anggaran daerah pendukung pelaksanaan Prioritas Nasional dalam rancangan RKPD dan Renja PD.
 2. Menjadi dasar pembahasan dalam Kortek Provinsi dan Musrenbang Provinsi.

PENUTUP

5

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dan tindaklanjut pasca Kortek Perencanaan yaitu:

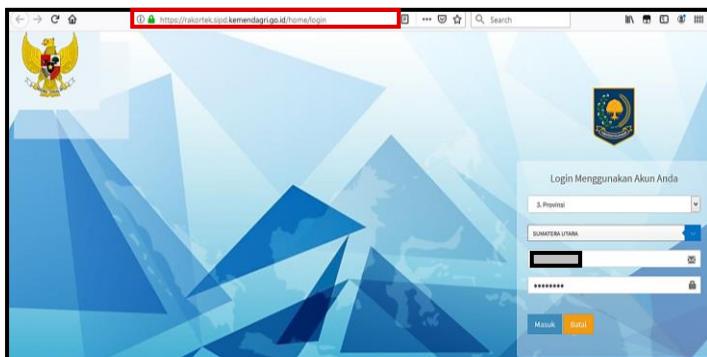
1. Berdasarkan Berita Acara hasil Kortek, Kementerian/Lembaga Non Kementerian melakukan penyempurnaan program, kegiatan, lokasi dan anggaran pada RKP dan Renja K/L.
2. Berdasarkan Berita Acara hasil Kortek, Pemerintah Daerah melakukan penyempurnaan program, kegiatan, lokasi dan anggaran dalam mendukung Proyek Prioritas Nasional dan pencapaian target pembangunan nasional dalam rancangan RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
3. Hasil Kortek Perencanaan menjadi salah satu materi pembahasan dalam Musrenbang Nasional.
4. Hasil Kortek Perencanaan dijabarkan oleh provinsi dalam pelaksanaan Kortek Provinsi.
5. Hasil Kortek Provinsi yang diikuti oleh kabupaten/kota menjadi salah satu materi pembahasan dalam Musrenbang Provinsi.

A. Pemerintah Daerah

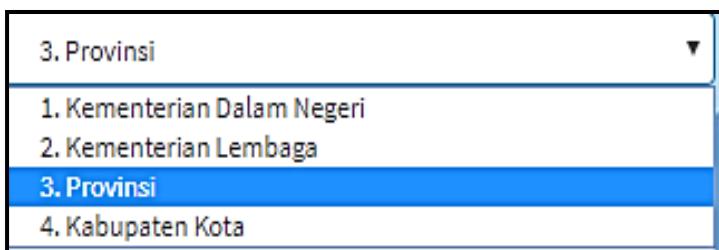
1. Login

- a. Masuk ke alamat url

<https://rakortek.sipd.kemendagri.go.id>, Anda akan melihat tampilan sebagai berikut:



- b. Pilih “provinsi” kemudian input *Username* dan *Password* untuk login ke dalam sistem.



- c. Login menggunakan akun anda dan selanjutnya klik "Masuk".



- d. Setelah masuk tampilan Dashboard sebagai berikut:

2. Sinkronisasi Ranwal RKPD ke Indikator Kinerja Urusan

Hal pertama yang harus dilakukan pengguna adalah pengisian Rancangan Awal RKPD (Ranwal), bila Ranwal sudah ada, dapat langsung diintegrasikan ke e-Rakortek, langkahnya sebagai berikut:

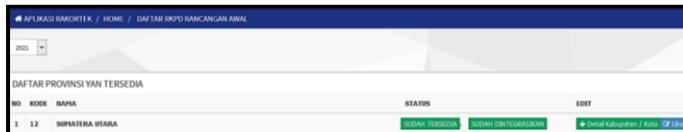
a. Pilih “Pra Rakortek”



b. Pilih Sinkronisasi Ranwal ke Indikator Kinerja Urusan



Setelah memilih, maka tampilan sebagai berikut:



c. Pilih “lihat” pada kolom edit



Maka akan terlihat tampilan sebagai berikut:

NO	KODE	INDIKATOR	TARGET NARASI	TARGET DAKAR	AKSI
1	00005	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas	8,05 Tahun	Atasang Tahun	<input type="button" value="Di Target dan Cataran"/> <input type="button" value="Hilang"/>
2	00006	Harapan Lama Sekolah	13,6 Tahun	Atasang Tahun	<input type="button" value="Di Target dan Cataran"/> <input type="button" value="Hilang"/>
3	00009	Angka Kematan Bayi per 100.000 kelahiran hidup	217 Jawa	Atasang Jawa	<input type="button" value="Di Target dan Cataran"/> <input type="button" value="Hilang"/>
4	00010	Angka kematan Bayi per 1000 kelahiran hidup	19,5 Jawa	Atasang Jawa	<input type="button" value="Di Target dan Cataran"/> <input type="button" value="Hilang"/>
5	00011	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	21,1 %	Atasang %	<input type="button" value="Di Target dan Cataran"/> <input type="button" value="Hilang"/>

- d. Pilih menu “Sinkronisasi Data Ranwal ke Indikator Kinerja Urusan”

SIKRONISASI DATA RANWAL KE INDIKATOR KINERJA URUSAN

Selanjutnya akan tampil tabel Indikator Program/Kegiatan beserta rinciannya sebagai berikut:

PIIH URUSAN		SIKRONISASI DATA RANWAL KE INDIKATOR KINERJA URUSAN						
NO	KODE	IMPLEMENTASI KEGIATAN / PENDIDIKAN / KEGIATAN KEGIATAN	IMPLEMENTASI PROGRAM / KEGIATAN / KEGIATAN	TARGET NARASI	TARGET DAKAR	PAGD	SKPD	AKSI
		KAB. KEPULAUAN LABUAN BAJA				24,946,261,500		
	1.01.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini		240,000,000				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.15.58	• Pengembangan pendidikan anak usia dini		50,000,000				<input type="button" value="+ MENDUKUNG INDIKATOR KINERJA URUSAN"/>
	1.01.15.42	• Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini		100,000,000				<input type="button" value="+ MENDUKUNG INDIKATOR KINERJA URUSAN"/>
	1.01.15.74	• Pengembangan Kreatifitas Anak Usia Dini		50,000,000				<input type="button" value="+ MENDUKUNG INDIKATOR KINERJA URUSAN"/>
	1.01.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sekolah Tahun		9,030,000,000				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.16.301	• Rehabilitasi Gedung SMPN15 (DAK)		0				<input type="button" value="+ MENDUKUNG INDIKATOR KINERJA URUSAN"/>
	1.01.16.302	• Pengembangan Pulu SMPN15 (DAK)		0				<input type="button" value="+ MENDUKUNG INDIKATOR KINERJA URUSAN"/>
	1.01.16.312	• Program Indonesia Raya (PIR)		10,000,000				<input type="button" value="+ MENDUKUNG INDIKATOR KINERJA URUSAN"/>
	1.01.16.119	• Peningkatan pengembangan dan kesiapan SD		220,000,000				<input type="button" value="+ MENDUKUNG INDIKATOR KINERJA URUSAN"/>

- e. Pilih “+mendukung Indikator Kinerja Urusan”

+ MENDUKUNG INDIKATOR KINERJA URUSAN

Selanjutnya akan muncul tampilan input/pengisian seperti berikut:

SINKRONISASI RKPD KE INDIKATOR KINERJA URUSAN

INDIKATOR KINERJA URUSAN	: <input type="text" value="PILIH INDIKATOR KINERJA URUSAN"/>																								
TARGET NASIONAL	: 0 %	TARGET DAERAH	: 0 %																						
DETAL KEGIATAN YANG PILIH <table border="1"> <tr> <td>NAMA PROGRAM</td> <td>: Program Pendidikan Anak Usia Dini</td> <td>TOTAL PAGU</td> <td>: 240,000,000</td> </tr> <tr> <td>TAHUN ANGGARAN</td> <td>: 2021</td> <td colspan="2">TOTAL INDIKATOR CAPOAAN : 1</td> </tr> <tr> <td>NAMA KEGIATAN</td> <td colspan="3">: PENGELENGKAPAN KURIKULUM, BAHAN AJAR DAN MODEL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI</td> </tr> <tr> <th>NO</th> <th>INDIKATOR</th> <th>TARGET NASIONAL</th> <th>TARGET DAERAH</th> <th>AKSI</th> </tr> <tr> <td colspan="5">DATA KOSONG</td> </tr> </table>				NAMA PROGRAM	: Program Pendidikan Anak Usia Dini	TOTAL PAGU	: 240,000,000	TAHUN ANGGARAN	: 2021	TOTAL INDIKATOR CAPOAAN : 1		NAMA KEGIATAN	: PENGELENGKAPAN KURIKULUM, BAHAN AJAR DAN MODEL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI			NO	INDIKATOR	TARGET NASIONAL	TARGET DAERAH	AKSI	DATA KOSONG				
NAMA PROGRAM	: Program Pendidikan Anak Usia Dini	TOTAL PAGU	: 240,000,000																						
TAHUN ANGGARAN	: 2021	TOTAL INDIKATOR CAPOAAN : 1																							
NAMA KEGIATAN	: PENGELENGKAPAN KURIKULUM, BAHAN AJAR DAN MODEL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI																								
NO	INDIKATOR	TARGET NASIONAL	TARGET DAERAH	AKSI																					
DATA KOSONG																									

Tutup **Simpan**

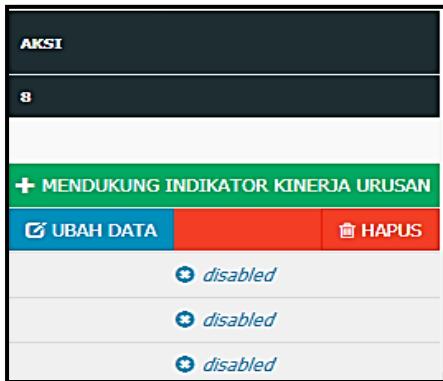
- f. Isi menyesuaikan detail kegiatan yang dipilih, kemudian klik “simpan”

Berikut tampilan data yang sudah disimpan:

APLIKASI RAKORTEK / HOME / DAFTAR RKP/RANCANGAN AWAL

PILIH URUSAN		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET NASIONAL	TARGET DAERAH	PAGU	AKSI
NO	KODE			6	5	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
KAB. [REDAKSI]							
1.8.1.5 Program Pendidikan Anak Usia Dini							
1.8.1.5.1 Pengembangan pendidikan anak usia dini							
1.8.1.5.1.1 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini							
1.8.1.5.1.2 Pengembangan Kredifit Anak Usia Dini							
1.8.1.6 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun							
1.8.1.6.101 Pengembangan Kurikulum							
1.8.1.6.102 Pengembangan Mata SMP/MTs (DAK)							
1.8.1.6.112 Program Indonesia Pintar (PIP)							
1.8.1.6.119 Penyelenggaraan usaha kota							

- g. Jika ingin mengubah dan menghapus data, pilih dari kolom aksi



3. Sinkronisasi Ranwal RKPD ke Indikator Makro
 - a. Pilih “Pra Rakortek”
 - b. Kemudian pilih “Sinkronisasi Ranwal ke Indikator Makro”
 - c. Pilih “Lihat” pada Daftar Provinsi yang tersedia untuk menuju proses pengisian target indikator makro.

- d. Pilih “Ubah” pada list indikator makro yang akan diisi.
- e. Isikan target pada kolom “Target (2021)”. Target Pertumbuhan Ekonomi yang diisi minimal sama dengan

Target Nasional Provinsi. Target Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran maksimal sama dengan Target Nasional Provinsi.

- f. Isikan keterangan terkait target tersebut pada kolom "keterangan".
 - g. Lalu klik "Simpan".
 - h. Usulan target hanya diisi oleh Bappeda provinsi.

4. Menambah Usulan Daerah

- a. Pilih "Pra Rakortek".
 - b. Kemudian pilih "Usulan Daerah".

Selanjutnya akan muncul tampilan sebagai berikut:

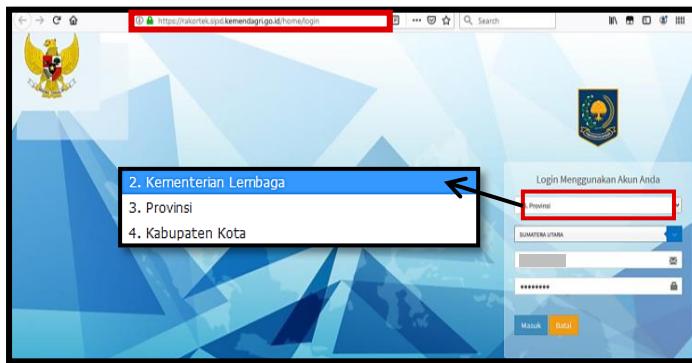
- c. Pilih tambah usulan untuk mengisi usulan baru
Muncul tampilan seperti berikut ini:

- d. Pilih Major Project yang menjadi Prioritas.
 - e. Pilih Kementerian/Lembaga yang akan diusulkan.
 - f. Pilih Program, Kegiatan, Output, Sub Output, dan Proyek Prioritas yang sesuai.
 - g. Isikan uraian jenis usulan kolom “Uraian Usulan”.
 - h. Isikan jumlah target dan satuan pada kolom “Target”.
 - i. Isikan Instansi Pengusul pada kolom “Nama Pengusul”.
 - j. Isikan detail lokasi usulan yang akan disasar pada kolom “Detail Lokasi”.
 - k. Pilih dukungan kegiatan APBD yang mendukung PN.
 - l. Isikan dukungan kesiapan daerah terhadap usulan baik berupa kesiapan lahan, pembiayaan, perizinan, maupun hal lain yang sudah disiapkan oleh daerah.
 - m. Klik “Simpan” untuk menyimpan data usulan.
 - n. Proses Verifikasi Usulan oleh Provinsi
Pilih menu “Detail” pada Daftar Usulan. Pilih menu “Setuju” jika usulan sudah sesuai atau “Dikembalikan” jika usulan kurang sesuai. Berikan catatan jika Setuju ataupun dikembalikan lalu pilih “Ya”.
 - o. Tampilan input usulan provinsi adalah sebagai berikut:

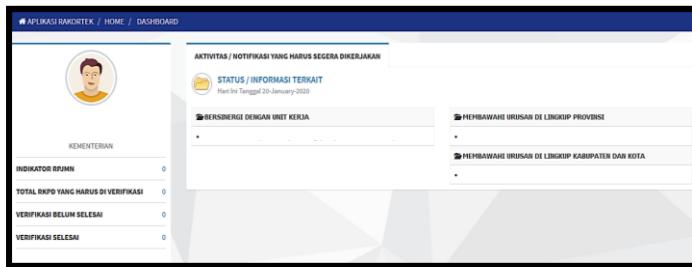
B. Kementerian/Lembaga

1. Login

- a. Masuk ke alamat url <https://rakortek.sipd.kemendagri.go.id>. Pilih Instansi “Kementerian/Lembaga”, kemudian Input Username dan Password untuk Login ke dalam aplikasi.

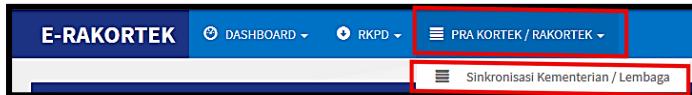


- b. Anda akan melihat tampilan sebagai berikut:



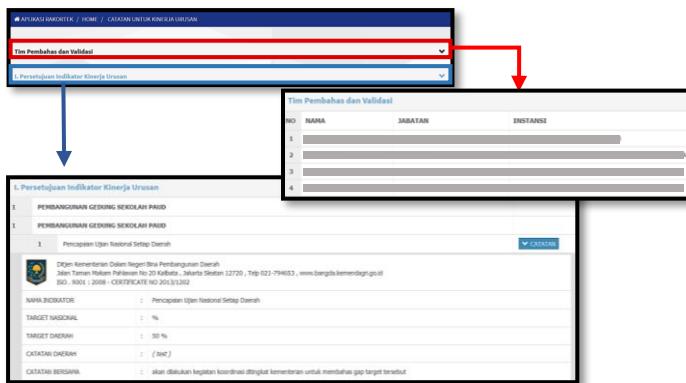
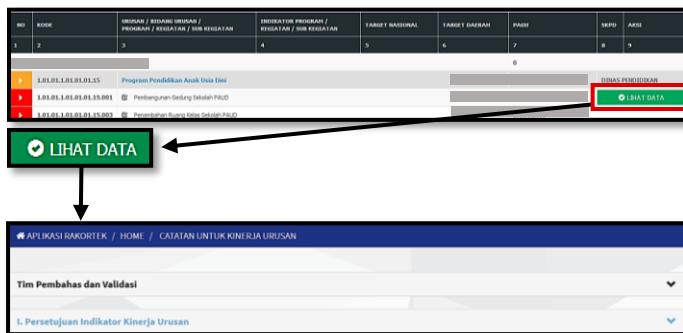
2. Sinkronisasi Kementerian/Lembaga

- a. Pada aplikasi, pilih “Pra Rakortek”. Kemudian pilih “Sinkronisasi Kementerian/Lembaga”.



b. Melihat data dan detail kinerja urusan

Pilih “Urusan”, misal: urusan Pendidikan. Kemudian tampil “program/kegiatan/sub kegiatan”, pilih “lihat data” pada kolom aksi. Akan tampil halaman detail dan catatan untuk kinerja urusan yang telah *dimapping*.

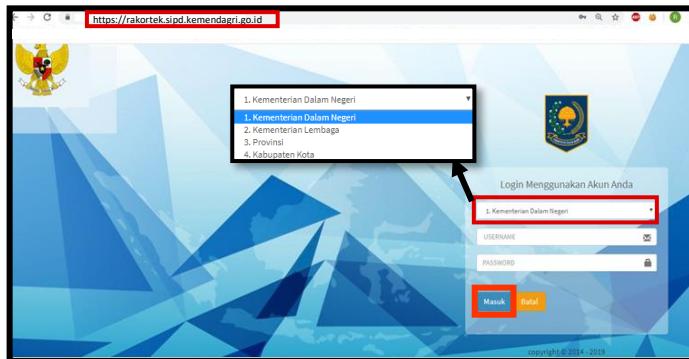


C. Pembahasan dalam Desk Urusan

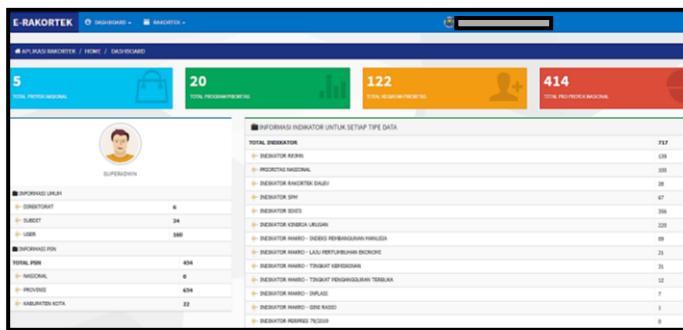
1. Login

Masuk ke alamat url <https://rakortek.sipd.kemendagri.go.id>.

Pilih Instansi “Kementerian Dalam Negeri”, kemudian Input Username dan Password untuk Login ke dalam aplikasi.



Selanjutnya, akan terlihat tampilan sebagai berikut:



2. Menentukan Tim Verifikasi

a. Menentukan Tim Verifikasi, yang akan melakukan penandatanganan Berita Acara sebagai bagian dari laporan hasil Rakortek

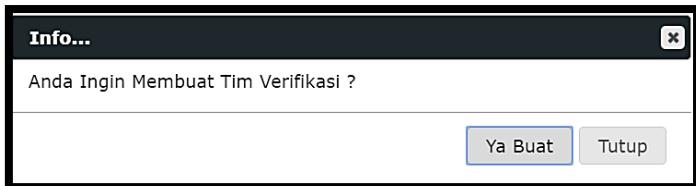
- b. Tim Verifikasi terdiri:
 - 1) Kemendagri (Ditjen Bina Pembangunan Daerah);
 - 2) Bappenas;
 - 3) Kementerian/Lembaga terkait urusan; dan
 - 4) Bappeda atau Perangkat Daerah provinsi.
- c. Pilih “Rakortek”, kemudian pilih “Tim Verifikasi”



- d. Setelah itu “Tambah Tim Verifikasi”



Kemudian pilih “Ya” pada pop up konfirmasi untuk melanjutkan ke halaman “Pemesanan Ruangan”:



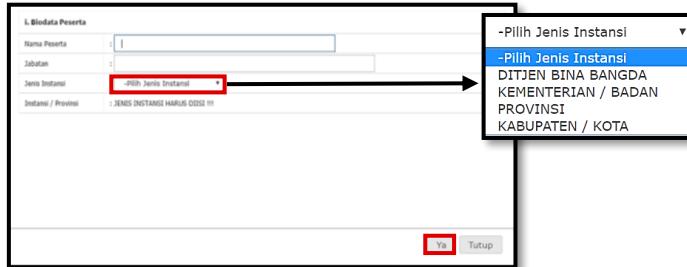
- e. Inisiasi Desk

Setelah diarahkan ke halaman “Pemesanan Ruangan”, pilih “Tambah Peserta”:



f. Input Biodata Peserta Desk

Selanjutnya user akan diarahkan ke pengisian Biodata Tim Verifikasi. Isikan ke empat anggota tim (nama, jabatan, dan instansi masing-masing). Kemudian klik “ya” untuk menyimpan.



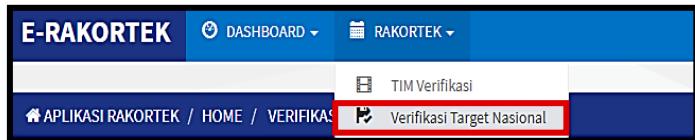
Isikan sesuai jumlah anggota Tim Verifikasi yang hadir di desk. Klik “ubah” untuk mengubah data jika ada kesalahan input, dan klik “hapus” untuk menghapus data. Pastikan semua data anggota Tim Verifikasi sudah diisi dengan benar, kemudian klik “selesai”.

Setelah itu akan muncul halaman “Pembentukan Tim Verifikasi” sebagai berikut:

A screenshot of a table titled 'Pembentukan Tim Verifikasi'. The table has columns for 'NO', 'PROVINSI', 'KI PENGAMPU', 'DETJEN BANGDA', and 'AKSI'. There are two rows of data. The first row has 'NO' 1, 'PROVINSI' (redacted), 'KI PENGAMPU' (redacted), 'DETJEN BANGDA' '0 Orang', and 'AKSI' with 'Ubah' and 'Hapus' buttons. The second row has 'NO' 2, 'PROVINSI' (redacted), 'KI PENGAMPU' (redacted), 'DETJEN BANGDA' '1 Orang', and 'AKSI' with 'Ubah' and 'Hapus' buttons. A note 'Ditambahkan 2' is at the bottom left of the table. A 'Tambah TM Verifikasi' button is at the top right.

3. Verifikasi Target Nasional

- Pilih “Rakortek”, kemudian “Verifikasi Target Nasional”



- Setelah itu pilih “verifikasi Dokumen”.

Pada tahap ini, tim verifikasi akan memverifikasi semua kegiatan daerah yang telah di-*mapping*.



- Proses verifikasi Program/Kegiatan Daerah terdiri dari tahapan sebagai berikut:

- 1) Verifikasi Target Indikator Kinerja Urusan

- Kesesuaian program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021 dalam mendukung pencapaian target pembangunan nasional untuk masing-masing urusan.
- Ketepatan dan kesepakatan penentuan target pembangunan nasional untuk masing-masing urusan.

- 2) Verifikasi Target RPJMN dan Prioritas Nasional

- Kesesuaian target yang ditetapkan pada RPJMN dengan kemampuan daerah.
- Ketepatan program/kegiatan dalam mendukung pelaksanaan RPJMN dan Prioritas Nasional.

- d. Setelah selesai diverifikasi, klik cetak untuk mencetak Berita Acara. Berikut tampilannya:

D. Pembahasan Desk Kewilayahan

1. Masuk alamat url <https://rakortek.sipd.go.id> kemudian Login e-Rakortek.
2. Buka menu Target Indikator Makro (Per Prov/Kab/Kota)
 - a. Pilih 3 (tiga) Indikator makro (target pembangunan provinsi) yang akan dibahas.

- b. Klik Konfirmasi/Approval Usulan **target indikator makro daerah**.
3. Buka menu **Usulan Major Project (max 3 Usulan Per Prov)**
 - a. Pilih usulan yang akan dibahas.
 - b. Konfirmasi Usulan Target, Lokasi dan dukungan Pemerintah Daerah:
 - kesiapan lahan,
 - izin, dan
 - pola pembiayaan
 - c. Pilih jenis kesepakatan (Diakomodir/Ditolak/Dibahas Lebih Lanjut).
 - d. Berikan catatan poin-poin penting pembahasan.
4. Buka menu **Usulan Non Major Project (maks. 3 Usulan per Prov dan 3 Usulan per Kab/Kota)**
 - a. Pilih usulan yang akan dibahas.
 - b. Konfirmasi Usulan Target, Lokasi dan dukungan Pemerintah Daerah:
 - kesiapan lahan,
 - izin, dan
 - pola pembiayaan
 - c. Pilih jenis kesepakatan (Diakomodir/Ditolak/Dibahas Lebih Lanjut).
 - d. Berikan catatan poin-poin penting pembahasan.
5. Pembahasan tema pembangunan Kawasan perbatasan negara dilakukan tanpa menggunakan input pada aplikasi e-Rakortek.
6. Buka menu Berita Acara
7. Print Berita Acara
8. Tanda Tangan Berita Acara

E. Panduan secara lengkap dapat diunduh di:
bit.ly/Kortekrenbang2020

JADWAL PELAKSANAAN

LAMPIRAN 2

REGIONAL I

Shangri-la Hotel - Surabaya, 2 s.d. 6 Maret 2020

NO	WAKTU	AGENDA	NARASUMBER
I.	Senin, 2 Maret 2020		
1.	12.00-18.00	Registrasi Peserta	
2.	18.00-19.00	Welcome Dinner	
3.	19.00-20.40	Paparan Panel	
		1. Kebijakan Pembangunan Nasional Dalam RKP Tahun 2021 dan Penjabarannya di Daerah	Deputi Bidang Pengembangan Regional, Bappenas
		2. Kebijakan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Tahun 2021	Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Kemenkeu
		3. Kebijakan Sinkronisasi dan Harmonisasi Pembangunan Nasional dan Daerah	Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri
		4. Inovasi Pembangunan Daerah Tertinggal melalui Ekonomi Digital	Dirjen Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemendes PDTT
4.	20.40-21.00	Sosialisasi "Implementasi KPBU dalam Mendukung Kemajuan Daerah"	Bappenas
5.	21.00 - selesai	Hiburan	Pemerintah Provinsi Jawa Timur

NO	WAKTU	AGENDA	NARASUMBER
II. Selasa, 3 Maret 2020			
1.	08.00-12.30 (3 sesi desk)	Pembahasan Desk	Kemendagri, Bappenas, K/L terkait dan Pemerintah Daerah
2.	12.30-13.30	ISHOMA	
3.	13.30-18.00 (3 sesi desk)	Pembahasan Desk	Kemendagri, Bappenas, K/L terkait dan Pemerintah Daerah
4.	18.00-19.00	ISHOMA	
5.	19.00-20.30 (1 sesi desk)	Pembahasan Desk	Kemendagri, Bappenas, K/L terkait dan Pemerintah Daerah
III. Rabu, 4 Maret 2020			
1.	08.00-09.00	Registrasi Peserta	
2.	09.00-11.00	Pembukaan:	
		1. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	
		2. Doa	
		3. Laporan Ketua Panitia	Dirjen Bina Bangda
		4. Ucapan Selamat Datang dari Gubernur	Gubernur Jawa Timur
		<i>Keynote Speech</i>	Menteri PPN/Kepala Bappenas
		5. "Pokok-pokok Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2021"	
		6. Arahan "Pemberantasan Korupsi Terintegrasi"	Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
		7. Sambutan sekaligus membuka acara secara resmi	Menteri Dalam Negeri

NO	WAKTU	AGENDA	NARASUMBER
3.	11.00-13.00	ISHOMA	
4.	13.00-17.30 (3 sesi desk)	Pembahasan Desk	Kemendagri, Bappenas, K/L terkait dan Pemerintah Daerah
5.	17.30-19.00	ISHOMA	
6.	19.00-20.30 (1 sesi desk)	Pembahasan Desk	Kemendagri, Bappenas, K/L terkait dan Pemerintah Daerah
IV. Kamis, 5 Maret 2020			
1.	08.00-12.30 (3 sesi desk)	Pembahasan Desk	Kemendagri, Bappenas, K/L terkait dan Pemerintah Daerah
2.	12.30-13.30	ISHOMA	
3.	13.30-18.00 (3 sesi desk)	Pembahasan Desk	Kemendagri, Bappenas, K/L terkait dan Pemerintah Daerah
4.	18.00-19.00	ISHOMA	
5.	19.00-20.30 (1 sesi desk)	Pembahasan Desk	Kemendagri, Bappenas, K/L terkait dan Pemerintah Daerah
V. Jumat, 6 Maret 2020			
1.	08.00-10.00	Penutupan	
		1. Pembacaan Hasil Rakortek dan Penutupan	Dirjen Bina Pembangunan Daerah

REGIONAL II
Hotel – Bandung, 9 s.d. 13 Maret 2020

NO	WAKTU	AGENDA	NARASUMBER
I.	Senin, 9 Maret 2020		
1.	12.00-18.00	Registrasi Peserta	
2.	18.00-19.00	Welcome Dinner	
		Paparan Panel	
		Kebijakan Pembangunan 1. Nasional Dalam RKP Tahun 2021 dan Penjabarannya di Daerah	Deputi Bidang Pengembangan Regional, Bappenas
3.	19.00-20.40	Kebijakan Perimbangan 2. Keuangan Pusat dan Daerah Tahun 2021	Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Kemenkeu
		Kebijakan Sinkronisasi dan 3. Harmonisasi Pembangunan Nasional dan Daerah	Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri
		4. Inovasi Pembangunan Daerah Tertinggal melalui Ekonomi Digital	Dirjen Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemendes PDTT
4.	20.40-21.00	Sosialisasi “Implementasi KPBU dalam Mendukung Kemajuan Daerah”	Bappenas
II.	Selasa, 10 Maret 2020		
1.	08.00-09.00	Registrasi Peserta	

NO	WAKTU	AGENDA	NARASUMBER
2.	09.00-11.00	Pembukaan:	
		1. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	
		2. Doa	
		3. Laporan Ketua Panitia	Dirjen Bina Bangda
		4. Ucapan Selamat Datang dari Gubernur	Gubernur Jawa Barat
		<i>Keynote Speech</i>	
		5. “Pokok-pokok Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2021”	Menteri PPN/Kepala Bappenas
3.	11.00-13.00	6. Arahan “Pemberantasan Korupsi Terintegrasi”	Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
		7. Sambutan sekaligus membuka acara secara resmi	Menteri Dalam Negeri
4.	13.00-17.30 (3 sesi desk)	ISHOMA	
5.	17.30-19.00	ISHOMA	
6.	19.00-20.30 (1 sesi desk)	Pembahasan Desk	Kemendagri, Bappenas, K/L terkait dan Pemerintah Daerah
III. Rabu, 11 Maret 2020			
1.	08.00-12.30 (3 sesi desk)	Pembahasan Desk	Kemendagri, Bappenas, K/L terkait dan Pemerintah Daerah
2.	12.30-13.30	ISHOMA	

NO	WAKTU	AGENDA	NARASUMBER
3.	13.30-18.00 (3 sesi <i>desk</i>)	Pembahasan Desk	Kemendagri, Bappenas, K/L terkait dan Pemerintah Daerah
4.	18.00-19.00	ISHOMA	
5.	19.00-20.30 (1 sesi <i>desk</i>)	Pembahasan Desk	Kemendagri, Bappenas, K/L terkait dan Pemerintah Daerah
IV. Kamis, 12 Maret 2020			
1.	08.00-12.30 (3 sesi <i>desk</i>)	Pembahasan Desk	Kemendagri, Bappenas, K/L terkait dan Pemerintah Daerah
2.	12.30-13.30	ISHOMA	
3.	13.30-18.00 (3 sesi <i>desk</i>)	Pembahasan Desk	Kemendagri, Bappenas, K/L terkait dan Pemerintah Daerah
4.	18.00-19.00	ISHOMA	
5.	19.00-20.30 (1 sesi <i>desk</i>)	Pembahasan Desk	Kemendagri, Bappenas, K/L terkait dan Pemerintah Daerah
V. Jumat, 13 Maret 2020			
1.	08.00-10.00	Penutupan	
		1. Pembacaan Hasil Rakortek dan Penutupan	Dirjen Bina Pembangunan Daerah

**PEMBAGIAN PESERTA
DALAM PEMBAHASAN DESK**

**LAMPIRAN
3**

Desk	Substansi Pembahasan	Peserta Pusat	Peserta Daerah
Desk 1	Urusan Pertanahan dan Sub Urusan Penataan Ruang	1. Kemendagri 2. Bappenas 3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pertanahan, Perangkat Daerah yang membidangi sub urusan Penataan Ruang, dan/atau Bappeda
Desk 2	Urusan ESDM	1. Kemendagri 2. Bappenas 3. Kementerian ESDM 4. Dewan Energi Nasional	Perangkat Daerah yang membidangi urusan ESDM dan/atau Bappeda
Desk 3	Urusan Pangan	1. Kemendagri 2. Bappenas 3. Kementerian Pertanian	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pangan dan/atau Bappeda
Desk 4	Urusan Pertanian	1. Kemendagri 2. Bappenas 3. Kementerian Pertanian	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pertanian dan/atau Bappeda
Desk 5	Urusan Lingkungan Hidup	1. Kemendagri 2. Bappenas 3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Lingkungan Hidup dan/atau Bappeda
Desk 6	Urusan Kehutanan	1. Kemendagri 2. Bappenas 3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kehutanan dan/atau Bappeda

Desk	Substansi Pembahasan	Peserta Pusat	Peserta Daerah
Desk 7	Sub Urusan PU Bina Marga	1. Kemendagri 2. Bappenas 3. Kementerian PUPR	Perangkat Daerah yang membidangi sub urusan Pekerjaan Umum - Jalan dan/atau Bappeda
Desk 8	Sub Urusan PU Sumber Daya Air	1. Kemendagri 2. Bappenas 3. Kementerian PUPR	Perangkat Daerah yang membidangi sub urusan Pekerjaan Umum - Sumber Daya Air dan/atau Bappeda
Desk 9	Sub Urusan PU Cipta Karya	1. Kemendagri 2. Bappenas 3. Kementerian PUPR	Perangkat Daerah yang membidangi sub urusan Keciptakaryaan dan/atau Bappeda
Desk 10	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1. Kemendagri 2. Bappenas 3. Kementerian PUPR	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan/atau Bappeda
Desk 11	Urusan Kelautan dan Perikanan	1. Kemendagri 2. Bappenas 3. Kementerian Kelautan dan Perikanan	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kelautan dan Perikanan dan/atau Bappeda
Desk 12	Urusan Perhubungan	1. Kemendagri 2. Bappenas 3. Kementerian Perhubungan 4. BPTJ	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perhubungan dan/atau Bappeda
Desk 13	Urusan Komunikasi dan Informatika	1. Kemendagri 2. Bappenas 3. Kementerian Komunikasi dan Informatika	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika dan/atau Bappeda

Desk	Substansi Pembahasan	Peserta Pusat	Peserta Daerah
Desk 14	Urusan Statistik	1. Kemendagri 2. Bappenas 3. BPS	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Statistik dan/atau Bappeda
Desk 15	Urusan Persandian	1. Kemendagri 2. Bappenas 3. BSSN	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Persandian dan/atau Bappeda
Desk 16	Urusan Kesehatan	1. Kemendagri 2. Bappenas 3. Kementerian Kesehatan 4. BPOM	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesehatan dan/atau Bappeda
Desk 17	Urusan Sosial	1. Kemendagri 2. Bappenas 3. Kementerian Sosial	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sosial dan/atau Bappeda
Desk 18	Urusan Kebudayaan	1. Kemendagri 2. Bappenas 3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kebudayaan dan/atau Bappeda
Desk 19	Urusan Koperasi dan UKM	1. Kemendagri 2. Bappenas 3. Kementerian Koperasi dan UKM	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Koperasi dan UKM dan/atau Bappeda
Desk 20	Urusan Penanaman Modal	1. Kemendagri 2. Bappenas 3. BKPM	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penanaman Modal dan/atau Bappeda
Desk 21	Urusan Perindustrian	1. Kemendagri 2. Bappenas 3. Kementerian Perindustrian	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perindustrian dan/atau Bappeda

Desk	Substansi Pembahasan	Peserta Pusat	Peserta Daerah
Desk 22	Urusan Perdagangan	1. Kemendagri 2. Bappenas 3. Kementerian Perdagangan	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perdagangan dan/atau Bappeda
Desk 23	Urusan Pariwisata	1. Kemendagri 2. Bappenas 3. Kementerian Pariwisata dan Ekraf	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pariwisata dan/atau Bappeda
Desk 24	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Polpum	1. Kemendagri 2. Bappenas	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Admindukcapil, Badan Kesbangpol, dan/atau Bappeda
Desk 25	Sub Urusan Bencana	1. Kementerian Dalam Negeri 2. Bappenas 3. BNPB	Perangkat Daerah yang membidangi sub urusan Bencana dan/atau Bappeda
Desk 26	Urusan Trantibumlinmas dan Urusan Pemdagri lainnya	1. Kemendagri 2. Bappenas	Sekretariat Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi urusan Trantibumlinmas (Satpol PP dan Damkar), Badan Litbang, BPSPM Provinsi, BPKAD, dan/atau Bappeda
Desk 27	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1. Kementerian Dalam Negeri 2. Bappenas 3. Kemendes dan PDTT	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan/atau Bappeda
Desk 28	Urusan Pendidikan	1. Kemendagri 2. Bappenas 3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendidikan dan/atau Bappeda

Desk	Substansi Pembahasan	Peserta Pusat	Peserta Daerah
Desk 29	Urusan Ketenagakerjaan	1. Kemendagri 2. Bappenas 3. Kementerian Ketenagakerjaan	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Ketenagakerjaan dan/atau Bappeda
Desk 30	Urusan Transmigrasi	1. Kemendagri 2. Bappenas 3. Kemendes dan PDTT	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Transmigrasi dan/atau Bappeda
Desk 31	Urusan PPPA	1. Kemendagri 2. Bappenas 3. Kementerian PPPA	Perangkat Daerah yang membidangi urusan PPPA dan/atau Bappeda
Desk 32	Urusan Pengendalian Penduduk dan KB	1. Kemendagri 2. Bappenas 3. BKKBN	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pengendalian Penduduk dan KB dan/atau Bappeda
Desk 33	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga	1. Kemendagri 2. Bappenas 3. Kementerian PORA	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepemudaan dan Olah Raga dan/atau Bappeda
Desk 34	Urusan Perpustakaan	1. Kemendagri 2. Bappenas 3. Perpustakaan Nasional	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perpustakaan dan/atau Bappeda
Desk 35	Urusan Kearsipan	1. Kemendagri 2. Bappenas 3. ANRI	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kearsipan dan/atau Bappeda
Desk 36	Kewilayahan – Pencapaian Indikator Makro dan Usulan	1. Kementerian PPN/Bappenas 2. Kementerian Dalam Negeri 3. Kementerian Pertanian 4. BPKPB Batam	Bappeda dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi urusan: 1. Pendidikan 2. Kesehatan

Desk	Substansi Pembahasan	Peserta Pusat	Peserta Daerah
		5. BPKPB Sabang 6. Kementerian Perindustrian 7. Kementerian ESDM 8. Kementerian Perhubungan 9. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 10. Kementerian Kesehatan 11. Kementerian Ketenagakerjaan 12. Kementerian Sosial 13. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 14. Kementerian Kelautan dan Perikanan 15. Kementerian PUPR 16. Kementerian Koperasi dan UKM 17. Kementerian PPPA 18. Kemenpan RB 19. BPS 20. Perpusnas 21. Kementerian Kominfo 22. BPOM 23. BKPM 24. Kemendes PDTT 25. BKKBN 26. BMKG	3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4. Sosial 5. Tenaga Kerja 6. Pangan 7. Perhubungan 8. Koperasi dan UKM 9. Penanaman Modal 10. Kepemudaan dan Olahraga 11. Statistik 12. Kelautan dan perikanan 13. Pariwisata 14. Pertanian 15. Kehutanan 16. Energi dan sumber daya mineral 17. Perdagangan 18. Perindustrian 19. Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara

Desk	Substansi Pembahasan	Peserta Pusat	Peserta Daerah
		27. LAN 28. ANRI 29. BKN 30. Kemenpora 31. BNPB 32. BNPP 33. BIG	
Desk 37	Kewilayahan – Pencapaian Indikator Makro dan Usulan	1. Kementerian PPN/Bappenas 2. Kementerian Dalam Negeri 3. Kementerian Pertanian 4. BPKPB Batam 5. BPKPB Sabang 6. Kementerian Perindustrian 7. Kementerian ESDM 8. Kementerian Perhubungan 9. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 10. Kementerian Kesehatan 11. Kementerian Ketenagakerjaan 12. Kementerian Sosial 13. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 14. Kementerian Kelautan dan Perikanan 15. Kementerian PUPR	Bappeda dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi urusan: 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4. Sosial 5. Tenaga Kerja 6. Pangan 7. Perhubungan 8. Koperasi dan UKM 9. Penanaman Modal 10. Kepemudaan dan Olahraga 11. Statistik 12. Kelautan dan perikanan 13. Pariwisata 14. Pertanian 15. Kehutanan 16. Energi dan sumber daya mineral 17. Perdagangan 18. Perindustrian 19. Pengelolaan Kawasan

Desk	Substansi Pembahasan	Peserta Pusat	Peserta Daerah
		16. Kementerian Koperasi dan UKM 17. Kementerian PPPA 18. Kemenpan RB 19. BPS 20. Perpusnas 21. Kementerian Kominfo 22. BPOM 23. BKPM 24. Kemendes PDTT 25. BKKBN 26. BMKG 27. LAN 28. ANRI 29. BKN 30. Kemenpora 31. BNPB 32. BNPP 33. BIG	Perbatasan Negara
Desk 38	Kewilayahan – Pencapaian Indikator Makro dan Usulan	1. Kementerian PPN/Bappenas 2. Kementerian Dalam Negeri 3. Kementerian Pertanian 4. BPKPB Batam 5. BPKPB Sabang 6. Kementerian Perindustrian 7. Kementerian ESDM 8. Kementerian Perhubungan 9. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Bappeda dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi urusan: 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4. Sosial 5. Tenaga Kerja 6. Pangan 7. Perhubungan 8. Koperasi dan UKM 9. Penanaman Modal

Desk	Substansi Pembahasan	Peserta Pusat	Peserta Daerah
		10. Kementerian Kesehatan 11. Kementerian Ketenagakerjaan 12. Kementerian Sosial 13. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 14. Kementerian Kelautan dan Perikanan 15. Kementerian PUPR 16. Kementerian Koperasi dan UKM 17. Kementerian PPPA 18. Kemenpan RB 19. BPS 20. Perpusnas 21. Kementerian Kominfo 22. BPOM 23. BKPM 24. Kemendes PDTT 25. BKKBN 26. BMKG 27. LAN 28. ANRI 29. BKN 30. Kemenpora 31. BNPB 32. BNPP 33. BIG	10. Kepemudaan dan Olahraga 11. Statistik 12. Kelautan dan perikanan 13. Pariwisata 14. Pertanian 15. Kehutanan 16. Energi dan sumber daya mineral 17. Perdagangan 18. Perindustrian 19. Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara

JADWAL PEMBAHASAN DESK PER PROVINSI

LAMPIRAN 4

Regional I

Prov. Jawa Timur, Prov. NTB, Prov. NTT dan Prov. Kalimantan Barat

Waktu	Prov. Jawa Timur	Prov. NTB	Prov. NTT	Prov. Kalimantan Barat
Selasa, 3 Maret 2020				
08.00-09.30	Lingkungan Hidup	Pertanian	Pangan	ESDM
	Pariwisata	Perdagangan	Perindustrian	Penanaman Modal
09.30-11.00	Kehutanan	Lingkungan Hidup	Pertanian	Pangan
	Admindukcapil	Pariwisata	Perdagangan	Perindustrian
11.00-12.30	PU Bina Marga	Kehutanan	Lingkungan Hidup	Pertanian
	Bencana	Admindukcapil	Pariwisata	Perdagangan
				Kewilayahana 2
12.30-13.30	ISHOMA	ISHOMA	ISHOMA	ISHOMA
13.30-15.00	PU SDA	PU Bina Marga	Kehutanan	Lingkungan Hidup
	Trantibumlinmas	Bencana	Admindukcapil	Pariwisata
15.00-16.30	PU Cipta Karya	PU SDA	PU Bina Marga	Kehutanan
	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Trantibumlinmas	Bencana	Admindukcapil
			Kewilayahana 1	
16.30-18.00	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	PU Cipta Karya	PU SDA	PU Bina Marga
	Pendidikan	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Trantibumlinmas	Bencana

Waktu	Prov. Jawa Timur	Prov. NTB	Prov. NTT	Prov. Kalimantan Barat
18.00-19.00	ISHOMA	ISHOMA	ISHOMA	ISHOMA
19.00-20.30	Kelautan dan Perikanan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	PU Cipta Karya	PU SDA
	Tenaga Kerja	Pendidikan	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Trantibumlinmas
Rabu, 4 Maret 2020				
08.00-11.00	PEMBUKAAN			
11.00-13.00	ISHOMA	ISHOMA	ISHOMA	ISHOMA
13.00-14.30	Penataan Ruang dan Pertanahan	Kebudayaan	Sosial	Kesehatan
	Koperasi dan UKM		Kearsipan	Perpustakaan
14.30-16.00	ESDM	Penataan Ruang dan Pertanahan	Kebudayaan	Sosial
	Penanaman Modal	Koperasi dan UKM		Kearsipan
16.00-17.30	Pangan	ESDM	Penataan Ruang dan Pertanahan	Kebudayaan
	Perindustrian	Penanaman Modal	Koperasi dan UKM	
		Kewilayahan 1		
18.00-19.00	ISHOMA	ISHOMA	ISHOMA	ISHOMA
19.00-20.30	Pertanian	Pangan	ESDM	Penataan Ruang dan Pertanahan
	Perdagangan	Perindustrian	Penanaman Modal	Koperasi dan UKM
Kamis, 5 Maret 2020				
08.00-09.30	Perhubungan	Kelautan dan Perikanan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	PU Cipta Karya
	Transmigrasi	Tenaga Kerja	Pendidikan	Pemberdayaan Masyarakat Desa
	Kewilayahan 3			

Waktu	Prov. Jawa Timur	Prov. NTB	Prov. NTT	Prov. Kalimantan Barat
09.30-11.00	Komunikasi dan Informatika	Perhubungan	Kelautan dan Perikanan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	Transmigrasi	Tenaga Kerja	Pendidikan
11.00-12.30	Statistik	Komunikasi dan Informatika	Perhubungan	Kelautan dan Perikanan
	Pengendalian Penduduk dan KB	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	Transmigrasi	Tenaga Kerja
12.30-13.30	ISHOMA	ISHOMA	ISHOMA	ISHOMA
13.30-15.00	Persandian	Statistik	Komunikasi dan Informatika	Perhubungan
	Kepemudaan dan OR	Pengendalian Penduduk dan KB	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	Transmigrasi
15.00-16.30	Kesehatan	Persandian	Statistik	Komunikasi dan Informatika
	Perpustakaan	Kepemudaan dan OR	Pengendalian Penduduk dan KB	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
16.30-18.00	Sosial	Kesehatan	Persandian	Statistik
	Kearsipan	Perpustakaan	Kepemudaan dan OR	Pengendalian Penduduk dan KB
18.00-19.00	ISHOMA	ISHOMA	ISHOMA	ISHOMA
19.00-20.30	Kebudayaan	Sosial	Kesehatan	Persandian
		Kearsipan	Perpustakaan	Kepemudaan dan OR

Prov. Kalimantan Tengah, Prov. Kalimantan Selatan, Prov. Kalimantan Timur, dan Prov. Kalimantan Utara

Waktu	Prov. Kalimantan Tengah	Prov. Kalimantan Selatan	Prov. Kalimantan Timur	Prov. Kalimantan Utara
Selasa, 3 Maret 2020				
08.00-09.30	Penataan Ruang dan Pertanahan	Kebudayaan	Sosial	Komunikasi dan Informatika
	Koperasi dan UKM	Kewilayahan 2	Kearsipan	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
				Kewilayahan 2
09.30-11.00	ESDM	Penataan Ruang dan Pertanahan	Kebudayaan	Sosial
	Penanaman Modal	Koperasi dan UKM		Kearsipan
11.00-12.30	Pangan	ESDM	Penataan Ruang dan Pertanahan	Kebudayaan
	Perindustrian	Penanaman Modal	Koperasi dan UKM	
	Kewilayahan 1			
12.30-13.30	ISHOMA	ISHOMA	ISHOMA	ISHOMA
13.30-15.00	Pertanian	Pangan	ESDM	Penataan Ruang dan Pertanahan
	Perdagangan	Perindustrian	Penanaman Modal	Koperasi dan UKM
15.00-16.30	Lingkungan Hidup	Pertanian	Pangan	ESDM
	Pariwisata	Perdagangan	Perindustrian	Penanaman Modal
16.30-18.00	Kehutanan	Lingkungan Hidup	Pertanian	Pangan
	Admindukcapil	Pariwisata	Perdagangan	Perindustrian
18.00-19.00	ISHOMA	ISHOMA	ISHOMA	ISHOMA
19.00-20.30	PU Bina Marga	Kehutanan	Lingkungan Hidup	Pertanian
	Bencana	Admindukcapil	Pariwisata	Perdagangan

Waktu	Prov. Kalimantan Tengah	Prov. Kalimantan Selatan	Prov. Kalimantan Timur	Prov. Kalimantan Utara
Rabu, 4 Maret 2020				
08.00-11.00	PEMBUKAAN			
11.00-13.00	ISHOMA	ISHOMA	ISHOMA	ISHOMA
13.00-14.30	Persandian	Statistik	Sosial	Perhubungan
	Kepemudaan dan OR	Pengendalian Penduduk dan KB	Kearsipan	Transmigrasi
				Kewilayahan 3
14.30-16.00	Kesehatan	Persandian	Statistik	Sosial
	Perpustakaan	Kepemudaan dan OR	Pengendalian Penduduk dan KB	Kearsipan
16.00-17.30	Sosial	Kesehatan	Persandian	Statistik
	Kearsipan	Perpustakaan	Kepemudaan dan OR	Pengendalian Penduduk dan KB
			Kewilayahan 3	
18.00-19.00	ISHOMA	ISHOMA	ISHOMA	ISHOMA
19.00-20.30	Kebudayaan	Sosial	Komunikasi dan Informatika	Persandian
		Kearsipan	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	Kepemudaan dan OR
Kamis, 5 Maret 2020				
08.00-09.30	PU SDA	PU Bina Marga	Kehutanan	Lingkungan Hidup
	Trantibumlinmas	Bencana	Admindukcapil	Pariwisata
09.30-11.00	PU Cipta Karya	PU SDA	PU Bina Marga	Kehutanan
	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Trantibumlinmas	Bencana	Admindukcapil
11.00-12.30	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	PU Cipta Karya	PU SDA	PU Bina Marga
	Pendidikan	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Trantibumlinmas	Bencana

Waktu	Prov. Kalimantan Tengah	Prov. Kalimantan Selatan	Prov. Kalimantan Timur	Prov. Kalimantan Utara
12.30-13.30	ISHOMA	ISHOMA	ISHOMA	ISHOMA
13.30-15.00	Kelautan dan Perikanan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	PU Cipta Karya	PU SDA
	Tenaga Kerja	Pendidikan	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Trantibumlinmas
15.00-16.30	Perhubungan	Kelautan dan Perikanan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	PU Cipta Karya
	Transmigrasi	Tenaga Kerja	Pendidikan	Pemberdayaan Masyarakat Desa
16.30-18.00	Komunikasi dan Informatika	Perhubungan	Kelautan dan Perikanan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	Transmigrasi	Tenaga Kerja	Pendidikan
18.00-19.00	ISHOMA	ISHOMA	ISHOMA	ISHOMA
19.00-20.30	Statistik	Komunikasi dan Informatika	Perhubungan	Kelautan dan Perikanan
	Pengendalian Penduduk dan KB	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	Transmigrasi	Tenaga Kerja

Prov. Sulawesi Tengah, Prov. Sulawesi Barat, Prov. Sulawesi Selatan, dan Prov. Gorontalo

Waktu	Prov. Sulawesi Tengah	Prov. Sulawesi Barat	Prov. Sulawesi Selatan	Prov. Gorontalo
Selasa, 3 Maret 2020				
08.00-09.30	Persandian	Statistik	Komunikasi dan Informatika	Perhubungan
	Kepemudaan dan OR	Pengendalian Penduduk dan KB	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	Transmigrasi
09.30-11.00	Kesehatan	Persandian	Statistik	Komunikasi dan Informatika
	Perpustakaan	Kepemudaan dan OR	Pengendalian Penduduk dan KB	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
11.00-12.30	Sosial	Kesehatan	Persandian	Statistik
	Kearsipan	Perpustakaan	Kepemudaan dan OR	Pengendalian Penduduk dan KB
	Kewilayahan 3			
12.30-13.30	ISHOMA	ISHOMA	ISHOMA	ISHOMA
13.30-15.00	Kebudayaan	Sosial	Kesehatan	Persandian
		Kearsipan	Perpustakaan	Kepemudaan dan OR
15.00-16.30	Penataan Ruang dan Pertanahan	Kebudayaan	Sosial	Kesehatan
	Koperasi dan UKM		Kearsipan	Perpustakaan
16.30-18.00	ESDM	Penataan Ruang dan Pertanahan	Kebudayaan	Sosial
	Penanaman Modal	Koperasi dan UKM		Kearsipan
18.00-19.00	ISHOMA	ISHOMA	ISHOMA	ISHOMA
19.00-20.30	Pangan	ESDM	Penataan Ruang dan Pertanahan	Kebudayaan
	Perindustrian	Penanaman Modal	Koperasi dan UKM	
Rabu, 4 Maret 2020				
08.00-11.00	PEMBUKAAN			
11.00-13.00	ISHOMA	ISHOMA	ISHOMA	ISHOMA

Waktu	Prov. Sulawesi Tengah	Prov. Sulawesi Barat	Prov. Sulawesi Selatan	Prov. Gorontalo
13.00-14.30	Kelautan dan Perikanan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	PU Cipta Karya	PU SDA
	Tenaga Kerja	Pendidikan	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Trantibumlinmas
		Kewilayahan 1		
14.30-16.00	Perhubungan	Kelautan dan Perikanan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	PU Cipta Karya
	Transmigrasi	Tenaga Kerja	Pendidikan	Pemberdayaan Masyarakat Desa
16.00-17.30	Komunikasi dan Informatika	Perhubungan	Kelautan dan Perikanan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	Transmigrasi	Tenaga Kerja	Pendidikan
18.00-19.00	ISHOMA	ISHOMA	ISHOMA	ISHOMA
19.00-20.30	Statistik	Komunikasi dan Informatika	Perhubungan	Kelautan dan Perikanan
	Pengendalian Penduduk dan KB	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	Transmigrasi	Tenaga Kerja
Kamis, 5 Maret 2020				
08.00-09.30	Pertanian	Pangan	ESDM	Penataan Ruang dan Pertanahan
	Perdagangan	Perindustrian	Penanaman Modal	Koperasi dan UKM
			Kewilayahan 1	Kewilayahan 2
09.30-11.00	Lingkungan Hidup	Pertanian	Pangan	ESDM
	Pariwisata	Perdagangan	Perindustrian	Penanaman Modal
11.00-12.30	Kehutanan	Lingkungan Hidup	Pertanian	Pangan
12.30-13.30	Admindukcapil	Pariwisata	Perdagangan	Perindustrian
	ISHOMA	ISHOMA	ISHOMA	ISHOMA

Waktu	Prov. Sulawesi Tengah	Prov. Sulawesi Barat	Prov. Sulawesi Selatan	Prov. Gorontalo
13.30-15.00	PU Bina Marga	Kehutanan	Lingkungan Hidup	Pertanian
	Bencana	Admindukcapil	Pariwisata	Perdagangan
15.00-16.30	PU SDA	PU Bina Marga	Kehutanan	Lingkungan Hidup
	Trantibumlinmas	Bencana	Admindukcapil	Pariwisata
16.30-18.00	PU Cipta Karya	PU SDA	PU Bina Marga	Kehutanan
	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Trantibumlinmas	Bencana	Admindukcapil
18.00-19.00	ISHOMA	ISHOMA	ISHOMA	ISHOMA
19.00-20.30	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	PU Cipta Karya	PU SDA	PU Bina Marga
	Pendidikan	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Trantibumlinmas	Bencana

Prov. Sulawesi Utara, Prov. Sulawesi Tenggara, Prov. Maluku, dan Prov. Maluku Utara

Waktu	Prov. Sulawesi Utara	Prov. Sulawesi Tenggara	Prov. Maluku	Prov. Maluku Utara
Selasa, 3 Maret 2020				
08.00-09.30	Kelautan dan Perikanan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	PU Cipta Karya	PU SDA
	Tenaga Kerja	Pendidikan	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Trantibumlinmas
			Kewilayahan 3	
09.30-11.00	Perhubungan	Kelautan dan Perikanan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	PU Cipta Karya
	Transmigrasi	Tenaga Kerja	Pendidikan	Pemberdayaan Masyarakat Desa
11.00-12.30	Komunikasi dan Informatika	Perhubungan	Kelautan dan Perikanan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	Transmigrasi	Tenaga Kerja	Pendidikan
12.30-13.30	ISHOMA	ISHOMA	ISHOMA	ISHOMA
13.30-15.00	Statistik	Komunikasi dan Informatika	Perhubungan	Kelautan dan Perikanan
	Pengendalian Penduduk dan KB	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	Transmigrasi	Tenaga Kerja
15.00-16.30	Persandian	Statistik	Komunikasi dan Informatika	Perhubungan
	Kepemudaan dan OR	Pengendalian Penduduk dan KB	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	Transmigrasi
	Kewilayahan 3	Kewilayahan 2		
16.30-18.00	Kesehatan	Persandian	Statistik	Komunikasi dan Informatika
	Perpustakaan	Kepemudaan dan OR	Pengendalian Penduduk dan KB	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Waktu	Prov. Sulawesi Utara	Prov. Sulawesi Tenggara	Prov. Maluku	Prov. Maluku Utara
18.00-19.00	ISHOMA	ISHOMA	ISHOMA	ISHOMA
19.00-20.30	Sosial	Kesehatan	Persandian	Statistik
	Kearsipan	Perpustakaan	Kepemudaan dan OR	Pengendalian Penduduk dan KB
Rabu, 4 Maret 2020				
08.00-11.00	PEMBUKAAN			
11.00-13.00	ISHOMA	ISHOMA	ISHOMA	ISHOMA
13.00-14.30	PU Bina Marga	Kehutanan	Lingkungan Hidup	Pertanian
	Bencana	Admindukcapil	Pariwisata	Perdagangan
14.30-16.00	PU SDA	PU Bina Marga	Kehutanan	Lingkungan Hidup
	Trantibumlinmas	Bencana	Admindukcapil	Pariwisata
16.00-17.30	PU Cipta Karya	PU SDA	PU Bina Marga	Kehutanan
	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Trantibumlinmas	Bencana	Admindukcapil
				Kewilayahan 2
18.00-19.00	ISHOMA	ISHOMA	ISHOMA	ISHOMA
19.00-20.30	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	PU Cipta Karya	PU SDA	PU Bina Marga
	Pendidikan	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Trantibumlinmas	Bencana
Kamis, 5 Maret 2020				
08.00-09.30	Kebudayaan	Sosial	Kesehatan	Persandian
		Kearsipan	Perpustakaan	Kepemudaan dan OR
09.30-11.00	Penataan Ruang dan Pertanahan	Kebudayaan	Sosial	Kesehatan
	Koperasi dan UKM		Kearsipan	Perpustakaan
11.00-12.30	ESDM	Penataan Ruang dan Pertanahan	Kebudayaan	Sosial
	Penanaman Modal	Koperasi dan UKM		Kearsipan

Waktu	Prov. Sulawesi Utara	Prov. Sulawesi Tenggara	Prov. Maluku	Prov. Maluku Utara
12.30-13.30	ISHOMA	ISHOMA	ISHOMA	ISHOMA
13.30-15.00	Pangan	ESDM	Penataan Ruang dan Pertanahan	Kebudayaan
	Perindustrian	Penanaman Modal	Koperasi dan UKM	
15.00-16.30	Pertanian	Pangan	ESDM	Penataan Ruang dan Pertanahan
	Perdagangan	Perindustrian	Penanaman Modal	Koperasi dan UKM
16.30-18.00	Lingkungan Hidup	Pertanian	Pangan	ESDM
	Pariwisata	Perdagangan	Perindustrian	Penanaman Modal
18.00-19.00	ISHOMA	ISHOMA	ISHOMA	ISHOMA
19.00-20.30	Kehutanan	Lingkungan Hidup	Pertanian	Pangan
	Admindukcapil	Pariwisata	Perdagangan	Perindustrian

Prov. Papua dan Prov. Papua Barat

Waktu	Prov. Papua	Prov. Papua Barat
Selasa, 3 Maret 2020		
08.00-09.30	PU Bina Marga	Kehutanan
	Bencana	Admindukcapil
		Kewilayahann 1
09.30-11.00	PU SDA	PU Bina Marga
	Trantibumlinmas	Bencana
11.00-12.30	PU Cipta Karya	PU SDA
	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Trantibumlinmas
12.30-13.30	ISHOMA	ISHOMA
13.30-15.00	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	PU Cipta Karya
	Pendidikan	Pemberdayaan Masyarakat Desa
15.00-16.30	Kelautan dan Perikanan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Tenaga Kerja	Pendidikan
16.30-18.00	Perhubungan	Kelautan dan Perikanan
	Transmigrasi	Tenaga Kerja
18.00-19.00	ISHOMA	ISHOMA
19.00-20.30	Komunikasi dan Informatika	Perhubungan
	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	Transmigrasi
Rabu, 4 Maret 2020		
08.00-11.00	PEMBUKAAN	
11.00-13.00	ISHOMA	ISHOMA
13.00-14.30	Pangan	ESDM
	Perindustrian	Penanaman Modal
14.30-16.00	Pertanian	Pangan
	Perdagangan	Perindustrian
16.00-17.30	Lingkungan Hidup	Pertanian
	Pariwisata	Perdagangan
18.00-19.00	ISHOMA	ISHOMA
19.00-20.30	Kehutanan	Lingkungan Hidup
	Admindukcapil	Pariwisata

Waktu	Prov. Papua	Prov. Papua Barat
Kamis, 5 Maret 2020		
08.00-09.30	Statistik	Komunikasi dan Informatika
	Pengendalian Penduduk dan KB	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
	Kewilayahan 2	
09.30-11.00	Persandian	Statistik
	Kepemudaan dan OR	Pengendalian Penduduk dan KB
11.00-12.30	Kesehatan	Persandian
	Perpustakaan	Kepemudaan dan OR
12.30-13.30	ISHOMA	ISHOMA
13.30-15.00	Sosial	Kesehatan
	Kearsipan	Perpustakaan
15.00-16.30	Kebudayaan	Sosial
		Kearsipan
16.30-18.00	Penataan Ruang dan Pertanahan	Kebudayaan
	Koperasi dan UKM	
18.00-19.00	ISHOMA	ISHOMA
19.00-20.30	ESDM	Penataan Ruang dan Pertanahan
	Penanaman Modal	Koperasi dan UKM

REGIONAL II

Prov. Aceh, Prov. Sumatera Utara, Prov. Sumatera Barat, dan Prov. Kep. Riau

Waktu	Prov. Aceh	Prov. Sumatera Utara	Prov. Sumatera Barat	Prov. Kep. Riau
Selasa, 10 Maret 2020				
13.00-14.30	Penataan Ruang dan Pertanahan	Kesehatan	Persandian	Statistik
	Sosial	Pengendalian Penduduk dan KB	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	Transmigrasi
	Kepemudaan dan OR			
	Kewilayahan 2			
14.30-16.00	ESDM	Penataan Ruang dan Pertanahan	Kesehatan	Persandian
	Kebudayaan	Sosial	Pengendalian Penduduk dan KB	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
	Perpustakaan	Kepemudaan dan OR		
16.00-17.30	Pangan	ESDM	Penataan Ruang dan Pertanahan	Kesehatan
	Koperasi dan UKM	Kebudayaan	Sosial	Pengendalian Penduduk dan KB
	Kearsipan	Perpustakaan	Kepemudaan dan OR	Kewilayahan 3
18.00-19.00	ISHOMA	ISHOMA	ISHOMA	ISHOMA
19.00-20.30	Pertanian	Pangan	ESDM	Penataan Ruang dan Pertanahan
	Penanaman Modal	Koperasi dan UKM	Kebudayaan	Sosial
		Kearsipan	Perpustakaan	Kepemudaan dan OR

Waktu	Prov. Aceh	Prov. Sumatera Utara	Prov. Sumatera Barat	Prov. Kep. Riau
Rabu, 11 Maret 2020				
08.00-09.30	Lingkungan Hidup	Pertanian	Pangan	ESDM
	Perindustrian	Penanaman Modal	Koperasi dan UKM	Kebudayaan
		Kewilayahana 1	Kearsipan	Perpustakaan
09.30-11.00	Kehutanan	Lingkungan Hidup	Pertanian	Pangan
	Perdagangan	Perindustrian	Penanaman Modal	Koperasi dan UKM
				Kearsipan
11.00-12.30	PU Bina Marga	Kehutanan	Lingkungan Hidup	Pertanian
	Pariwisata dan Ekraf	Perdagangan	Perindustrian	Penanaman Modal
12.30-13.30	ISHOMA	ISHOMA	ISHOMA	ISHOMA
13.30-15.00	PU SDA	PU Bina Marga	Kehutanan	Lingkungan Hidup
	Admindukcapil	Pariwisata dan Ekraf	Perdagangan	Perindustrian
15.00-16.30	PU Cipta Karya	PU SDA	PU Bina Marga	Kehutanan
	Bencana	Admindukcapil	Pariwisata dan Ekraf	Perdagangan
16.30-18.00	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	PU Cipta Karya	PU SDA	PU Bina Marga
	Trantibumlinmas	Bencana	Admindukcapil	Pariwisata dan Ekraf
18.00-19.00	ISHOMA	ISHOMA	ISHOMA	ISHOMA
19.00-20.30	Kelautan dan Perikanan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	PU Cipta Karya	PU SDA
	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Trantibumlinmas	Bencana	Admindukcapil

Waktu	Prov. Aceh	Prov. Sumatera Utara	Prov. Sumatera Barat	Prov. Kep. Riau
Kamis, 12 Maret 2020				
08.00-09.30	Perhubungan	Kelautan dan Perikanan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	PU Cipta Karya
	Pendidikan	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Trantibumlinmas	Bencana
09.30-11.00	Komunikasi dan Informatika	Perhubungan	Kelautan dan Perikanan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Tenaga Kerja	Pendidikan	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Trantibumlinmas
11.00-12.30	Statistik	Komunikasi dan Informatika	Perhubungan	Kelautan dan Perikanan
	Transmigrasi	Tenaga Kerja	Pendidikan	Pemberdayaan Masyarakat Desa
			Kewilayahan 3	
12.30-13.30	ISHOMA	ISHOMA	ISHOMA	ISHOMA
13.30-15.00	Persandian	Statistik	Komunikasi dan Informatika	Perhubungan
	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	Transmigrasi	Tenaga Kerja	Pendidikan
15.00-16.30	Kesehatan	Persandian	Statistik	Komunikasi dan Informatika
	Pengendalian Penduduk dan KB	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	Transmigrasi	Tenaga Kerja

Prov. Riau, Prov. Bengkulu, Prov. Jambi, dan Prov. Kep. Bangka Belitung

Waktu	Prov. Riau	Prov. Bengkulu	Prov. Jambi	Prov. Kep. Babel
Selasa, 10 Maret 2020				
13.00-14.30	Komunikasi dan Informatika	Perhubungan	Kelautan dan Perikanan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Tenaga Kerja	Pendidikan	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Trantibumlinmas
14.30-16.00	Statistik	Komunikasi dan Informatika	Perhubungan	Kelautan dan Perikanan
	Transmigrasi	Tenaga Kerja	Pendidikan	Pemberdayaan Masyarakat Desa
16.00-17.30	Persandian	Statistik	Komunikasi dan Informatika	Perhubungan
	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	Transmigrasi	Tenaga Kerja	Pendidikan
18.00-19.00	ISHOMA	ISHOMA	ISHOMA	ISHOMA
19.00-20.30	Kesehatan	Persandian	Statistik	Komunikasi dan Informatika
	Pengendalian Penduduk dan KB	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	Transmigrasi	Tenaga Kerja
Rabu, 11 Maret 2020				
08.00-09.30	Penataan Ruang dan Pertanahan	Kesehatan	Persandian	Statistik
	Sosial	Pengendalian Penduduk dan KB	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	Transmigrasi
	Kepemudaan dan OR			

Waktu	Prov. Riau	Prov. Bengkulu	Prov. Jambi	Prov. Kep. Babel
09.30-11.00	ESDM	Penataan Ruang dan Pertanahan	Kesehatan	Persandian
	Kebudayaan	Sosial	Pengendalian Penduduk dan KB	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
	Perpustakaan	Kepemudaan dan OR		
11.00-12.30	Pangan	ESDM	Penataan Ruang dan Pertanahan	Kesehatan
	Koperasi dan UKM	Kebudayaan	Sosial	Pengendalian Penduduk dan KB
	Kearsipan	Perpustakaan	Kepemudaan dan OR	Kewilayahana 3
12.30-13.30	ISHOMA	ISHOMA	ISHOMA	ISHOMA
13.30-15.00	Pertanian	Pangan	ESDM	Penataan Ruang dan Pertanahan
	Penanaman Modal	Koperasi dan UKM	Kebudayaan	Sosial
		Kearsipan	Perpustakaan	Kepemudaan dan OR
15.00-16.30	Lingkungan Hidup	Pertanian	Pangan	ESDM
	Perindustrian	Penanaman Modal	Koperasi dan UKM	Kebudayaan
	Kewilayahana 2		Kearsipan	Perpustakaan
			Kewilayahana 3	
16.30-18.00	Kehutanan	Lingkungan Hidup	Pertanian	Pangan
	Perdagangan	Perindustrian	Penanaman Modal	Koperasi dan UKM
				Kearsipan
18.00-19.00	ISHOMA	ISHOMA	ISHOMA	ISHOMA
19.00-20.30	PU Bina Marga	Kehutanan	Lingkungan Hidup	Pertanian
	Pariwisata dan Ekraf	Perdagangan	Perindustrian	Penanaman Modal

Waktu	Prov. Riau	Prov. Bengkulu	Prov. Jambi	Prov. Kep. Babel
Kamis, 12 Maret 2020				
08.00-09.30	PU SDA	PU Bina Marga	Kehutanan	Lingkungan Hidup
	Admindukcapil	Pariwisata dan Ekraf	Perdagangan	Perindustrian
		Kewilayahan 3		
09.30-11.00	PU Cipta Karya	PU SDA	PU Bina Marga	Kehutanan
	Bencana	Admindukcapil	Pariwisata dan Ekraf	Perdagangan
11.00-12.30	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	PU Cipta Karya	PU SDA	PU Bina Marga
	Trantibumlinmas	Bencana	Admindukcapil	Pariwisata dan Ekraf
12.30-13.30	ISHOMA	ISHOMA	ISHOMA	ISHOMA
13.30-15.00	Kelautan dan Perikanan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	PU Cipta Karya	PU SDA
	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Trantibumlinmas	Bencana	Admindukcapil
15.00-16.30	Perhubungan	Kelautan dan Perikanan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	PU Cipta Karya
	Pendidikan	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Trantibumlinmas	Bencana

Prov. Sumatera Selatan, Prov. Lampung, Prov. Banten, dan Prov. DKI Jakarta

Waktu	Prov. Sumatera Selatan	Prov. Lampung	Prov. Banten	Prov. DKI Jakarta
Selasa, 10 Maret 2020				
13.00-14.30	PU Cipta Karya	PU SDA	PU Bina Marga	Kehutanan
	Bencana	Admindukcapil	Pariwisata dan Ekraf	Perdagangan
	Kewilayahan 1		Kewilayahan 3	
14.30-16.00	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	PU Cipta Karya	PU SDA	PU Bina Marga
	Trantibumlinmas	Bencana	Admindukcapil	Pariwisata dan Ekraf
16.00-17.30	Kelautan dan Perikanan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	PU Cipta Karya	PU SDA
	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Trantibumlinmas	Bencana	Admindukcapil
18.00-19.00	ISHOMA	ISHOMA	ISHOMA	ISHOMA
19.00-20.30	Perhubungan	Kelautan dan Perikanan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	PU Cipta Karya
	Pendidikan	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Trantibumlinmas	Bencana
Rabu, 11 Maret 2020				
08.00-09.30	Komunikasi dan Informatika	Perhubungan	Kelautan dan Perikanan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Tenaga Kerja	Pendidikan	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Trantibumlinmas

Waktu	Prov. Sumatera Selatan	Prov. Lampung	Prov. Banten	Prov. DKI Jakarta
09.30-11.00	Statistik	Komunikasi dan Informatika	Perhubungan	Kelautan dan Perikanan
	Transmigrasi	Tenaga Kerja	Pendidikan	Pemberdayaan Masyarakat Desa
11.00-12.30	Persandian	Statistik	Komunikasi dan Informatika	Perhubungan
	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	Transmigrasi	Tenaga Kerja	Pendidikan
12.30-13.30	ISHOMA	ISHOMA	ISHOMA	ISHOMA
13.30-15.00	Kesehatan	Persandian	Statistik	Komunikasi dan Informatika
	Pengendalian Penduduk dan KB	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	Transmigrasi	Tenaga Kerja
15.00-16.30	Penataan Ruang dan Pertanahan	Kesehatan	Persandian	Statistik
	Sosial	Pengendalian Penduduk dan KB	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	Transmigrasi
	Kepemudaan dan OR	Kewilayahan 1		
16.30-18.00	ESDM	Penataan Ruang dan Pertanahan	Kesehatan	Persandian
	Kebudayaan	Sosial	Pengendalian Penduduk dan KB	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
	Perpustakaan	Kepemudaan dan OR		
18.00-19.00	ISHOMA	ISHOMA	ISHOMA	ISHOMA

Waktu	Prov. Sumatera Selatan	Prov. Lampung	Prov. Banten	Prov. DKI Jakarta
19.00-20.30	Pangan	ESDM	Penataan Ruang dan Pertanahan	Kesehatan
	Koperasi dan UKM	Kebudayaan	Sosial	Pengendalian Penduduk dan KB
	Kearsipan	Perpustakaan	Kepemudaan dan OR	
Kamis, 12 Maret 2020				
08.00-09.30	Pertanian	Pangan	ESDM	Penataan Ruang dan Pertanahan
	Penanaman Modal	Koperasi dan UKM	Kebudayaan	Sosial
		Kearsipan	Perpustakaan	Kepemudaan dan OR
09.30-11.00	Lingkungan Hidup	Pertanian	Pangan	ESDM
	Perindustrian	Penanaman Modal	Koperasi dan UKM	Kebudayaan
			Kearsipan	Perpustakaan
11.00-12.30	Kehutanan	Lingkungan Hidup	Pertanian	Pangan
	Perdagangan	Perindustrian	Penanaman Modal	Koperasi dan UKM
				Kearsipan
				Kewilayahana 2
12.30-13.30	ISHOMA	ISHOMA	ISHOMA	ISHOMA
13.30-15.00	PU Bina Marga	Kehutanan	Lingkungan Hidup	Pertanian
	Pariwisata dan Ekraf	Perdagangan	Perindustrian	Penanaman Modal
15.00-16.30	PU SDA	PU Bina Marga	Kehutanan	Lingkungan Hidup
	Admindukcapil	Pariwisata dan Ekraf	Perdagangan	Perindustrian

Prov. Jawa Barat, Prov. Jawa Tengah, Prov. DI Yogyakarta dan Prov. Bali

Waktu	Prov. Jawa Barat	Prov. Jawa Tengah	Prov. DI Yogyakarta	Prov. Bali
Selasa, 10 Maret 2020				
13.00-14.30	Lingkungan Hidup	Pertanian	Pangan	ESDM
	Perindustrian	Penanaman Modal	Koperasi dan UKM	Kebudayaan
			Kearsipan	Perpustakaan
14.30-16.00	Kehutanan	Lingkungan Hidup	Pertanian	Pangan
	Perdagangan	Perindustrian	Penanaman Modal	Koperasi dan UKM
				Kearsipan
16.00-17.30	PU Bina Marga	Kehutanan	Lingkungan Hidup	Pertanian
	Pariwisata dan Ekraf	Perdagangan	Perindustrian	Penanaman Modal
18.00-19.00	ISHOMA	ISHOMA	ISHOMA	ISHOMA
19.00-20.30	PU SDA	PU Bina Marga	Kehutanan	Lingkungan Hidup
	Admindukcapil	Pariwisata dan Ekraf	Perdagangan	Perindustrian
Rabu, 11 Maret 2020				
08.00-09.30	PU Cipta Karya	PU SDA	PU Bina Marga	Kehutanan
	Bencana	Admindukcapil	Pariwisata dan Ekraf	Perdagangan
	Kewilayahan 2	Kewilayahan 3		
09.30-11.00	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	PU Cipta Karya	PU SDA	PU Bina Marga
	Trantibumlinmas	Bencana	Admindukcapil	Pariwisata dan Ekraf

Waktu	Prov. Jawa Barat	Prov. Jawa Tengah	Prov. DI Yogyakarta	Prov. Bali
11.00-12.30	Kelautan dan Perikanan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	PU Cipta Karya	PU SDA
	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Trantibumlinmas	Bencana	Admindukcapil
12.30-13.30	ISHOMA	ISHOMA	ISHOMA	ISHOMA
13.30-15.00	Perhubungan	Kelautan dan Perikanan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	PU Cipta Karya
	Pendidikan	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Trantibumlinmas	Bencana
15.00-16.30	Komunikasi dan Informatika	Perhubungan	Kelautan dan Perikanan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Tenaga Kerja	Pendidikan	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Trantibumlinmas
16.30-18.00	Statistik	Komunikasi dan Informatika	Perhubungan	Kelautan dan Perikanan
	Transmigrasi	Tenaga Kerja	Pendidikan	Pemberdayaan Masyarakat Desa
18.00-19.00	ISHOMA	ISHOMA	ISHOMA	ISHOMA
19.00-20.30	Persandian	Statistik	Komunikasi dan Informatika	Perhubungan
	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	Transmigrasi	Tenaga Kerja	Pendidikan
Kamis, 12 Maret 2020				
08.00-09.30	Kesehatan	Persandian	Statistik	Komunikasi dan Informatika
	Pengendalian Penduduk dan KB	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	Transmigrasi	Tenaga Kerja
			Kewilayahan 1	Kewilayahan 2

Waktu	Prov. Jawa Barat	Prov. Jawa Tengah	Prov. DI Yogyakarta	Prov. Bali
09.30-11.00	Penataan Ruang dan Pertanahan	Kesehatan	Persandian	Statistik
	Sosial	Pengendalian Penduduk dan KB	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	Transmigrasi
	Kepemudaan dan OR			
11.00-12.30	ESDM	Penataan Ruang dan Pertanahan	Kesehatan	Persandian
	Kebudayaan	Sosial	Pengendalian Penduduk dan KB	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
	Perpustakaan	Kepemudaan dan OR		
12.30-13.30	ISHOMA	ISHOMA	ISHOMA	ISHOMA
13.30-15.00	Pangan	ESDM	Penataan Ruang dan Pertanahan	Kesehatan
	Koperasi dan UKM	Kebudayaan	Sosial	Pengendalian Penduduk dan KB
	Kearsipan	Perpustakaan	Kepemudaan dan OR	
15.00-16.30	Pertanian	Pangan	ESDM	Penataan Ruang dan Pertanahan
	Penanaman Modal	Koperasi dan UKM	Kebudayaan	Sosial
		Kearsipan	Perpustakaan	Kepemudaan dan OR